

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini mengambil objek penelitian Rumah Zakat yang merupakan Lembaga philanthropy islam yang mengelola dana kebajikan yaitu dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya, dalam pengimplementasinya rumah zakat melakukan penyaluran dana ke program program untuk kegiatan keagamaan dan pengentasan kemiskinan dan kegiatan kemanusiaan lainnya, adapun visi Rumah Zakat ialah

#### **VISI**

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

#### **MISI**

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

Kegiatannya Rumah Zakat telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai keputusan Menteri Agama RI No. 421 Tahun 2015, serta sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014, dalam mengimplementasikan program pemberdayaannya Rumah Zakat mengusung gerakan bernama Desa Berdaya.

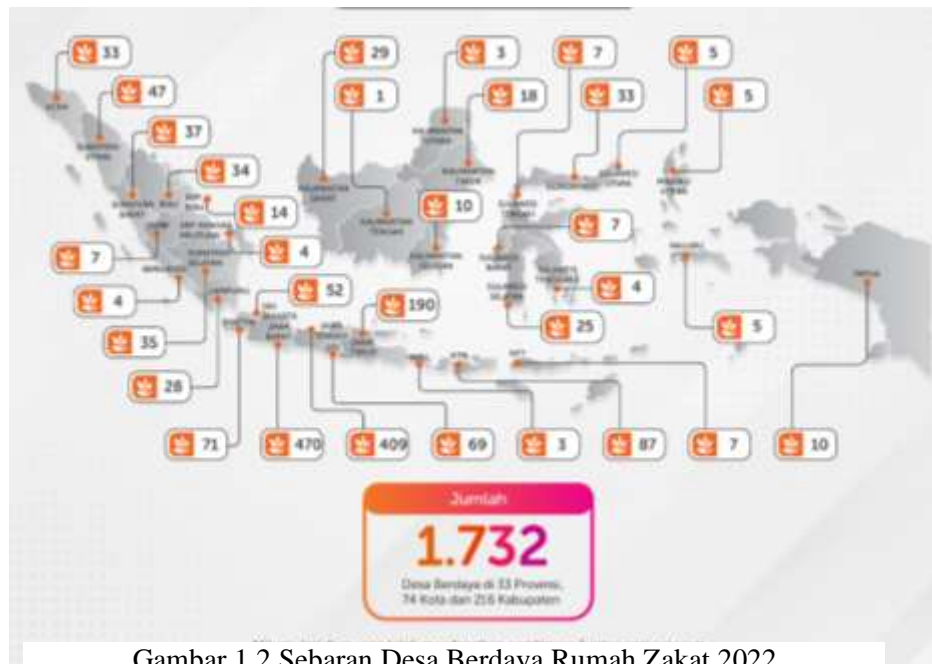


*Gambar 1.1 Logo Gerakan Desa Berdaya*

Sumber : Profile Desa Berdaya, 2022

Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa (dan Sebagian kelurahan), melalui pendekatan terintegrasi yaitu program *capacity building*

(pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan menggabungkan kekuatan dan asset yang dimiliki, serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa. (Profile Desa Berdaya, 2022) dalam melakukan program pengentasan kemiskinan Rumah Zakat memiliki gerakan Desa Berdaya, program ini memiliki wilayah dan komunitas binaan tersebar seperti gamabr (Profile Desa Berdaya, 2022)



Gambar 1.2 Sebaran Desa Berdaya Rumah Zakat 2022

Sumber : Profile Desa Berdaya Rumah Zakat

Dalam merealisasikan konsepnya, Desa berdaya menggunakan beberapa pendekatan agar implementasi di lapangan dapat berjalan secara sistematis terarah dan tepat sasaran pendekatan yang digunakan antara lain kemiskinan multidimensional pemberdayaan dan string base community development (pengembangan masyarakat fokus pada kekuatan dan Aset yang dimiliki)



Gambar 1.3 Konsep Desa Berdaya Rumah Zakat  
 Sumber : Profile Desa Berdaya Rumah Zakat

VISI : Menjadi Centre of Excellence dalam pemberdayaan masyarakat yang berdampak sosial dan berkelanjutan

- MISION :
1. Memperkuat local heroes sebagai motor perubahan
  2. Meningkatkan kolaborasi dengan ekosistem pemberdayaan
  3. Menumbuhkan Socio Enterprise
  4. Mendorong duplikasi praktik baik dan advokasi kebijakan



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Desa Berdaya

Sumber : Profile Desa Berdaya Rumah Zakat 2022

Desa Berdaya Rumah Zakat terus melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga pada tanggal 26 Juli 2016 Rumah Zakat dengan program Desa Berdaya telah berhasil mendapatkan predikat Special Consultative Status dari The

Economic and Social Council (ECOSOC) United Nations (PBB) sehingga memungkinkan Rumah Zakat berpartisipasi secara resmi dalam kegiatan UN/PBB di skala internasional.

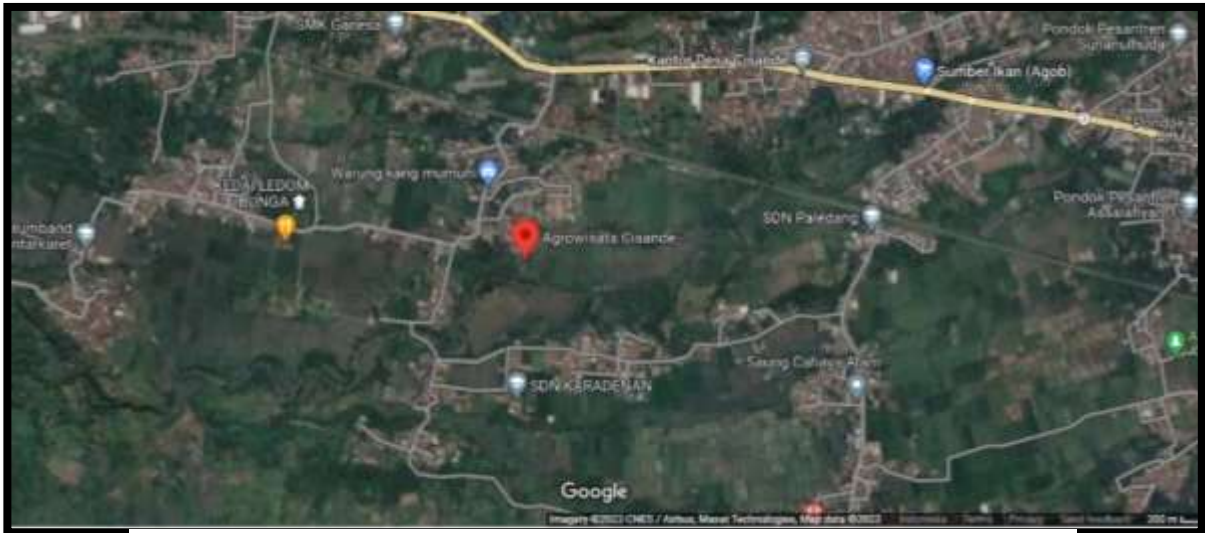
NO	Program	Keterangan
1	Capacity Building	Mengembangkan serangkaian kegiatan pendampingan masyarakat sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan karakter SDM, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari kelompok/organisasi
2	Ekonomi	Mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui edukasi dan forum yang berbasis potensi dan budaya lokal
		Menginsiasi dan/atau mengembangkan lembaga perekonomian
		Membuka peluang/akses yang lebih besar pada sarana dan prasarana
3	Kesehatan	Mengembangkan program promotif, program preventif, program kuratif, dan program rehabilitatif
4	Pendidikan	Membuat jejaring pendidikan formal (SD Juara)
		Membuka peluang pendidikan nonformal
		Membuka peluang kerja sama pendidikan lainnya
5	Lingkungan	Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan
		Memberikan edukasi dan menginisiasi infrastruktur lingkungan
		Aktivitas/ pengembangan partisipasi pemuda
		Mitigasi Bencana

**Tabel 1.1 Program Desa Berdaya Rumah Zakat**

Sumber : Modul Desa Berdaya 2020

Program yang dikembangkan oleh Desa Berdaya Rumah Zakat merupakan kegiatan sociopreneurship, dimana potensi dan budaya local yang berada di wilayah tersebut digali dan dikembangkan untuk masyarakat setempat Menurut (Ubud, 2020) Sociopreneurship adalah pendekatan oleh individu, kelompok, perusahaan baru atau pengusaha, di mana mereka mengembangkan, mendanai dan menerapkan solusi untuk masalah sosial (masyarakat), budaya, atau lingkungan yang ada di wilayahnya, sedangkan menurut (Parella 2020) sociopreneurship harus mencari hal atau membuat perubahan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah dengan mengubah sistem, menyebarkan solusi dan meyakinkan orang lain untuk ikut terlibat dalam melakukan perubahan bersama.

Menurut Desa Cisande merupakan salah satu desa di kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi provinsi Jawa barat. Lokasi desa Cisande tepat berada di pinggir jalan persimpangan utama wilayah Provinsi dan Daerah, juga dekat dengan pintu keluar tol dan merupakan kawasan wisata di Sukabumi. Jumlah penduduk sekitar 8.590 orang dan meliputi area seluas 192 Ha termasuk didalamnya sawah, pemukiman penduduk, sungai dan perkebunan, lokasi desa juga tidak jauh dari jalan utama provinsi, Sekitar 1 Km ke desa dengan akses mudah melalui jalan yang bagus. Dengan kondisi tersebut menjadikan salah satu potensi yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat adalah pengelolaan potensi alam dapat dimaksimalkan dengan menjadikan kecamatan Cisande sebagai tempat Wisata alam dan potensi lokal.



Gambar 1.5 Lokasi Desa Agrowisata Cisande

Sumber : <https://www.google.com/maps/place/Agrowisata+Cisande>

Pengembangan potensi tempat wisata di desa cisande diantaranya: *River Tubbing*, *Flying Fox*, *Wisata Edukasi*, *Kuliner*, *Bukit Cemara*, *Outbond* dan *Tracking*. Dukungan dari pemerintah daerah mempengaruhi kegiatan pemberdayaan yang berbasis pariwisata berkelanjutan di Desa Berdaya Cisande Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah desa adalah memberikan hak kepada kelompok untuk mengelola tanah pribadi, sehingga dengan adanya program ini. Dalam melakukan program Agrowisata Desa Berdaya Rumah Zakat



*Gambar 1.6 Kegiatan River Tubbing Agri Wisata Cisande*

Sumber : Profile Agrowisata Cisande



*Gambar 1.7 Peresmian Agrowisata Cisande*

Sumber : Profile Agrowisata Cisande 2021

## **1.2 Latar Belakang**

Menurut (Munandar, 2019) Model pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan bagi bentuk pembangunan konvensional, pendekatan konvensional melihat perkembangan hanya sebagai modernisasi dunia di sepanjang garis barat, teori modernisasi menyatakan bahwa semakin terstruktur dan terdiferensiasi suatu masyarakat semakin modern dan progresif. paradigma pembangunan baru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material dan nonmaterial manusia memajukan keadilan sosial memperluas efektivitas organisasi dan membangun kapasitas manusia dan teknis menuju keberlanjutan tujuan keberlanjutan memerlukan perlindungan basis sumber

daya alam yang menjadi dasar pengembangan masa depan titik pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari upaya baru untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial lingkungan dan ekonomi ke dalam paradigma pembangunan yang baru. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan adalah tentang mengarahkan perubahan kemasyarakatan pada

- Berkaitan dengan adat istiadat dan nilai-nilai manusia hubungan dan institusi
- Ekonomi menyangkut alokasi dan distribusi sumber daya yang langka
- Ekologis melibatkan kontribusi ekonomi dan sosial serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan sumber daya

Dikenal sebagai tiga dimensi atau pilar pembangunan berkelanjutan titik keterlibatan internasional dengan pembangunan keberlanjutan. 25 September tahun 2015 sebanyak 193 negara anggota PBB hadir dalam sidang umum PBB ke-70 dan menyepakati sebuah agenda pembangunan Global baru yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 SDGs juga menjadi sejarah baru dalam pembangunan Global karena dalam kesempatan kesepakatan SDGs termuat berbagai tujuan pembangunan universal baru yang ditujukan untuk periode 2015 sampai tahun 2030. (Munandar, 2019)

SDGs berupaya memberikan keseimbangan antara berbagai dimensi Pembangunan seperti dimensi ekonomi sosial dan lingkungan dengan membawa 5 prinsip yaitu *People* (manusia) *Planet* (bumi) *Prosperity* (kemakmuran) dan *Partnership* (Kerjasama). SDGs mengemban mandat dan agenda pembangunan Global yang lebih luas dan inklusif dengan cakupan masalah yang lebih beragam dan terperinci dibandingkan dengan MDGs ( UNDP , 2015 ) hal tersebut terlihat dari cakupan SDGs yang mencapai 17 tujuan dengan 169 target lebih luas dibandingkan dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan dengan 21 target data (BPS 2017) Indonesia merupakan satu dari 193 negara yang ikut menyepakati SDGs Oleh karena itu Indonesia juga harus merekam tujuan sdfs dalam setiap rencana pembangunan nasional menurut penerapan SDGs di Indonesia mengadopsi 3 prinsip dasar SDGs yaitu *universality integration* di dalam seluruh Pembangunan yang dilaksanakan. Tiga prinsip dasar tersebut bertujuan

untuk mengawal penerapan SDGs agar merata dan menyeluruh di semua wilayah memastikan tujuan pembangunan yang dilaksanakan saling terkait antar dimensi serta yang terpenting adalah memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal apapun latar belakangnya (BPS tahun 2017) pemerintah Indonesia kemudian mengatur SDGs di Indonesia dalam peraturan Indonesia kemudian mengatur SDGs di Indonesia dalam peraturan presiden atau Perpres tahun Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Perpres tersebut menyelaraskan antara 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres tersebut menyelaraskan antara 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 termasuk membentuk tim pelaksana yang mengawal pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (Setkab,2017)

Pentingnya pekerjaan yang layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan digarispawahi oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk "mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang produktif dan layak untuk semua orang". Pemerintah Indonesia akan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinasi pelaksanaan SDGs lintas sektor. Di poin SDGs 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.





**Gambar 2.1 SDGS**

Sumber : <https://sdgs.un.org/goals>

Secara umum masyarakat Indonesia hidup di dua lokasi yaitu kota dan desa diperkirakan sebesar tiga per empat masyarakat Indonesia tinggal di desa dan terkadang muncul masalah akibat adanya perbedaan kondisi sosial demografis kedua lokasi tersebut salah satunya adalah Kesenjangan antara desa dan kota yang selalu menjadi tugas utama pemerintah untuk mengurangi bahkan menghapuskan kesenjangan tersebut karena hal tersebut menjadi indikator dalam keberhasilan pembangunan nasional

Pemerintah Indonesia mengalami banyak perubahan setelah berakhirnya era Orde Baru yang ditandai dengan reformasi tahun 1999 yang memberikan banyak perubahan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia pada kenyataannya pembangunan dengan sistem sentralistik kurang berhasil dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia maka dari itu diperlukan perubahan paradigma yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semboyan pembangunan dan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapat tercapai (Mardeli, 2015)

Paradigma politik dan ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demografis demokratis demokratis dan dari

sistem sentralistik pada sistem otonom (Masasmita, 2003) perubahan paradigma tersebut sekaligus menjadi tanda bahwa era pemerintahan yang sentralistik di bawah undang-undang tahun nomor 5 tahun 1974 dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah berakhir, lalu lahir lah undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Aryo, 2018)

Angka kemiskinan Nasional 26,16 juta orang pada Maret 2022. Dari jumlah tersebut 14,34 juta ada di pedesaan, dan 11,82 juta ada di perkotaan, dengan membangun Menyelesaikan kemiskinan nasional dan mengurangi laju urbanisasi ke kota. Jika laju urbanisasi tidak dibendung, PBB memprediksi populasi Indonesia di 2050 sebesar 67% tinggal di kota. (BPS 2022)

Dalam pemberdayaan Desa Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi di Indonesia kemiskinan mempunyai definisi yang berbeda-beda Kemiskinan dapat diukur dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum Jika dilihat dari sisi ekonomi Seseorang dikatakan miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran masalah kemiskinan merupakan masalah yang terjadi tidak hanya di desa tetapi juga di kota pada tahun 1949 penduduk dunia tinggal di desa dibandingkan di kota namun pada tahun 2007 hingga saat ini terjadi perubahan yaitu perpindahan besar-besaran masyarakat desa yang pindah ke kota dan mengakibatkan tingginya laju populasi perkotaan melebihi pedesaan yang diikuti oleh tingkat kemiskinan desa yang semakin meningkat dibanding dengan kota (Aryo, 2018)

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022, prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan dalam rangka menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

1. Prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 didasarkan pada.
2. Kemanusiaan, adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia.
3. Keadilan, adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
4. Kebhinekaan, adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
5. Keseimbangan, alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;

Kebijakan strategis nasional, berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa dan sesuai dengan kondisi obyektif Desa, suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi. Prioritaskan penggunaan dana

desa pada tahun 2023 Mengutamakan penggunaan dana desa pada tahun 2023 untuk percepatan pencapaian target SDG desa antara lain:

1. Pemulihan ekonomi nasional menurut pemerintah desa:
2. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama; pengembangan usaha ekonomi produksi yang diprioritaskan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama;
3. dan pengembangan wisata desa kerajinan.

Dalam penggunaan dana desa pemerintah juga mengatur penggunaan dana untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan
2. Perkembangan desa melalui IDM;
3. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
4. Pencegahan dan penurunan stunting;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
6. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Perluasan akses layanan kesehatan;
8. Dana operasional pemerintah Desa (maksimal 3%);
9. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem

(Peraturan Kementerian Desa PDTT , 2022)

Pembangunan yang dilakukan di Desa megacu kepada SDGs Desa, dalam pembangunan keberlanjutan SDGs desa telah menyumbang 74% atas pencapaian SDGs Nasional (Kominfo, 2022) SDGs Desa mencakup tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan

Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat. Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.



Gambar 2.2 SDGs Desa

Sumber : <https://sid.kemendes.go.id/>



Gambar 2.3 Hasil Pembangunan Desa 2015 -2022

Sumber : <https://epaper.kompas.id/pdf/show/20221222>

Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) mengatakan bahwa pariwisata merupakan industri ujung tombak dan salah satunya penting bagi

pembangunan daerah suatu negara. data PBB untuk Pariwisata/UNWTO (“UNWTO Tourism Highlight”, 2014) menunjukkan bahwa 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh industri pariwisata, kontribusi industri tersebut pariwisata terhadap PDB global adalah 9% dan berkontribusi terhadap nilai tersebut ekspor dunia berjumlah 1,4 triliun dolar, setara dengan 5% ekspor terjadi di dunia. UNWTO memprediksi pada tahun 2030 jumlah pergerakan wisatawan internasional mengunjungi tempat-tempat wisata global mencapai 1,8 miliar orang dan jumlah perpindahan wisatawan domestik sebanyak 5 orang hingga 6 miliar orang (“Rencana Strategis Kementerian Pariwisata RI 2020-2024”). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sebuah "rapat terbatas" menyatakan bahwa hal itu akan membuat industri pariwisata merupakan ladang yang paling banyak menghasilkan devisa, karena menurutnya ladang tersebut Perjalanan adalah sumber daya yang tidak ada habisnya yang tidak akan pernah habis dapat menjalankan fungsi sebagai sumber penerimaan devisa terbesar dibandingkan dengan industri lainnya ("Rencana Strategis Kementerian Pariwisata RI 2020-2024").

Berdasarkan amanat RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020, salah satu target prioritas pembangunan adalah pengembangan 244 desa wisata. Pengembangan Desa Wisata dilaksanakan melalui kolaborasi lintas Kementerian. Kemenparekraf/Baparekraf ikut mengembangkan Desa Wisata sebagai bagian dari pemulihan pariwisata dengan menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui wisatawan nusantara dan pengembangan potensi ekonomi kreatif masyarakat di desa wisata. Pengembangan Desa Wisata yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan potensi lokal, dan nilai manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dalam pengembangan desa wisata Kemenperakraf/ Baparekraf akan berkolaborasi bersama stakeholder terkait. Pengembangan potensi desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di dalamnya diharapkan dapat menjadi lokomotif pengungkit perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk mengakselerasi Desa Wisata, Kemenparekraf membuat program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang secara rutin dilakukan, sehingga desa wisata

yang ada di seluruh Indonesia dapat berbenah dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penghargaan Desa Wisata ingin mengajak masyarakat desa untuk menggali potensi wisata yang menjadi kebanggaan Indonesia melalui 7 (tujuh) aspek penilaian tingkat pendapatan Daya Tarik Pengunjung, Host Family, Toilet Umum, souvenir, digital dan kreatif, CHSE dan Fasilitas. Agrowisata ini berhasil menang atau masuk ke nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di tahun 2021 dengan Desa Cisande berhasil masuk 50 nominasi Desa Wisata. Dengan berbagai program yang ada, sehingga berhasil mengundang masyarakat disekitar sukabumi dan atau sekitar Jawa Barat untuk hadir menikmati Agrowisata di Desa Cisande, berikut atraksi yang ditawarkan di Agrowisata Cisande (Jadesta, 2021) :

No	Jenis Kegiatan
1	Tracking dan Adventure
2	River Tubbing
3	Outbound
4	Edukasi pertanian untuk anak-anak
5	Wisata Kuliner
6	Atraksi Budaya Sunda (Silat dan tari)
7	Drumband Oma Opa

**Table 1.2 Daftar Atraksi Cisande**

Sumber : Laporan Pengunjung Agrowisata 2022

Berikut merupakan data pengunjung Agrowisata di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan kabupaten sukabumi

N0	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2019	339
2	2020	1455
3	2021	1979
4	2022	3309

**Table 1.3 Daftar Pengunjung Agrowisata Cisande**

Sumber : Laporan Pengunjung Agrowisata 2022

Sektor yang diharapkan untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat Cisande ialah Pertanian dengan rincian pekerjaan sekitar 40% warga Desa Cisande berprofesi sebagai buruh tani, 20 % sebagai petani, 20% sebagai Buruh Migran, serta 10% sebagai pedagang kecil dan 10% berprofesi pekerjaan lainnya, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kebanyakan memiliki kios-kios kecil dirumah mereka masing-masing. Biasanya menjual makanan ringan dan jajanan lainnya (Laporan Sosial Mapping Cisande, 2017 ) dengan adanya program tersebut diharapkan akan meningkatkan perekonomian kelompok atau masyarakat yang di intervensi. dalam menjalani program Agrowisata Desa Berdaya Rumah Zakat memiliki standarisasi program pemberdayaan desa wisata :



No	Uraian	Indikator	Hasil	Nilai Ideal	Nilai Desa	Tools
1	Dorongan Keinginan Mendirikan Desa Wisata	Komitmen Bersama (1. Perangkat Desa, 2. Tokoh Masyarakat/adat/kyai, 3. Masyarakat Desa, 4. Rumah Zakat/RI)	4	4	4	Surat Keputusan Bersama
2	Potensi Desa Wisata (Isikan dan Tuliskan penilaiannya di Hasil)					
	a. Yang bisa dilihat	Sangat layak (3), Layak (2), Cukup (1), Kurang layak (0)	Alam,Persawahan,Budaya,Kuliner	3	2	Dokumentasi (video & foto)
	b. Yang bisa dilakukan	Sangat layak (3), Layak (2), Cukup (1), Kurang layak (0)	Edukasi Wisata,Budaya dan Wisata Alam	3	3	Dokumentasi (video & foto)
	c. Yang bisa dimakan	Sangat layak (3), Layak (2), Cukup (1), Kurang layak (0)	Kuliner Desa,Kopi, Liwet	3	3	Dokumentasi (video & foto)
	d. Yang bisa beli	Sangat layak (3), Layak (2), Cukup (1), Kurang layak (0)	Abon Lelel,Sandak, Makanan	3	2	Dokumentasi (video & foto)
3	Dampak negatif yang terjadi (limbah dll)	Tidak ada (2), Ada dan tertangani dengan baik (1), ada tidak tertangani (0)		2	2	Hasil rapat
4	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Ada (sudah terbentuk 2020)	Ada SK 20 Januari 2020	1	1	Hasil rapat/ Surat Keputusan
5	Memiliki Visi Misi	Ada (1)	Ada	1	1	Visi dan Misi tertulis

6	Rencana Kerja	Ada (1)	Ada	1	1	Rencana Kerja tertulis
7	Regulasi atau SOP	Ada (1)	Proses	1	0	SOP tertulis
8	Fasilitas Sarana dan Prasarana					
	- Toilet	Ada (1)	Ada	1	1	Dokumentasi (video & foto)
	- Homestay	Ada (1)	Ada	1	0	Dokumentasi (video & foto)
	- Jaringan telepon/internet	Ada (1)	Ada	1	1	Testimoni
	- Akses jalan yang baik	Ada (1)	Ada	1	0	Dokumentasi (video & foto)
	- Toko souvenir/oleh-oleh	Ada (1)	Ada	1	0	Dokumentasi (video & foto)
	- Area parkir	Ada (1)	Proses Pemadatan	1	0	Dokumentasi (video & foto)
	- Air bersih	Ada (1)	Ada	1	1	Dokumentasi (video & foto)
	- Restoran/Rumah Makan	Ada (1)	Ada	2	1	Dokumentasi (video & foto)
	- Terdapat produk lokal	Ada (1)	Ada	2	1	Dokumentasi (video & foto)
	- Terdapat <i>tour guide</i>	Ada (1)	Ada	1	1	Dokumentasi (video & foto)
9	Media Promosi	Ada (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) (4)	Ada,IG,Tiktok	4	2	Ada jejak digitalnya
10	Keamanan	Tidak ada arus berbahaya, pencurian, penebangan, kepercayaan yang mengganggu dan bebas dari penyakit (4)	Ada	4	2	Wawancara masyarakat sekitar

11	Analisa Usaha	Profit dan Dana Sosial (6), Profit (3)	ada	6	2	Analisa Usaha (Excel)
12	Kolaborasi Pentahelix					
	a. Pemerintah	0 bila tidak ada, 1 kerjasama tapi tidak intens, 2 kerjasama intens	ada	2	1	
	b. akademisi	1 bila tidak ada, 1 kerjasama tapi tidak intens, 2 kerjasama intens	ada	2	1	
	c. pers	2 bila tidak ada, 1 kerjasama tapi tidak intens, 2 kerjasama intens	Ada	2	1	
	d. masyarakat	3 bila tidak ada, 1 kerjasama tapi tidak intens, 2 kerjasama intens	ada	2	1	
	e. pelaku usaha	4 bila tidak ada, 1 kerjasama tapi tidak intens, 2 kerjasama intens	ada	2	1	
13	Intervensi Penerima Manfaat	20% keluar dari Garis Kemiskinan	ada	5	2	
Note : Dikatakan "LAYAK" jika angka keseluruhan minimal mendapatkan angka 40				<b>61</b>	<b>27</b>	

Tabel 1.5 Monitoring dan Evaluasi Agrowisata Cisande

Sumber : Laporan Program Agrowisata Cisande 2022

Menurut Arikunto (2001) mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih, sehingga dengan mengetahui selisih tersebut di dapat diketahui hal apa saja yang perlu di perbaiki. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh rumah zakat dapat dilihat target yang telah ditetapkan belum tercapai, sangat diperlukan evaluasi program yang telah dilakukan, sehingga target yang telah di susun dapat dipenuhi, dengan adanya fenomena tersebut diatas, menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Desa Berdaya Rumah Zakat dalam Mewujudkan Program Keberlanjutan Menuju SDGs 8.9 Studi Kasus di Agrowisata Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Program Desa Wisata Cisande dalam melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan yang berbasis Community Based Tourism
2. Mengapa target yang telah ditetapkan tidak tercapai
3. Seperti apa tindak lanjut Desa Berdaya Rumah Zakat dalam menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Evaluasi program Agrowisata Cisande dalam melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan
2. Untuk Mengetahui mengapa target yang telah ditetapkan tidak tercapai
3. Untuk mengetahui tindak lanjut Desa Berdaya Rumah Zakat dalam menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

#### **a. Ilmu Pengetahuan**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan menjadi suatu konsep pengetahuan setiap institusi yang ingin melakukan pemberdayaan ke masyarakat, sehingga mampu di adaptasi dan di kembangkan lebih baik, penelitian ini juga menjadi bentuk pengabdian perguruan tinggi dalam membantu mengembangkan masyarakat di daerah desa wisata

#### **b. Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain terkait program pemberdayaan berbasis desa wisata yang sedang digalakan oleh pemerintah

### **1.5.2 Aspek Praktis**

#### **a. Perguruan Tinggi**

penelitian ini juga menjadi bentuk pengabdian perguruan tinggi dalam membantu mengembangkan masyarakat di daerah desa wisata.

#### **b. Desa Berdaya**

Dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan manajemen Desa Berdaya Rumah Zakat dalam membuat program pemberdayaan yang berkelanjutan